



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami telah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini dibuat dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan kebijaksanaan yang telah dipercayakan kepada OPD Dinas Perhubungan berdasarkan sistem akuntabilitas kinerja yang memadai.

Dan kami menyadari bahwa laporan ini masih perlu penyempurnaan, untuk itu kami harapkan saran dan masukan untuk penyempurnaan laporan ini. Dan atas segala kontribusi dan atensi yang telah diberikan kami ucapkan terima kasih.

Tanjung Pati, Februari 2020

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lima Puluh Kota



Ir. H. ANHARMEN

NIP. 19640102 199003 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Wewenang	1
C. Sumber Daya	2
D. Isu – Isu Strategis.....	2
E. Sistematika Penulisan	4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	5
A. Rencana Strategis (RENSTRA) OPD	5
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	7
A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja	7
B. Hasil Pengukuran Kinerja.....	7
C. Analisis dan Capaian Kinerja.....	8
D. Analisis Efisiensi Anggaran.....	21
E. Realisasi Pendapatan.....	25
BAB IV PENUTUP.....	26

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Harian Lepas (PHL) Dinas Perhubungan 2019.....	2
Tabel III. 1 Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2019.....	5
Tabel III. 2 Program Urusan Perhubungan pada Dinas Perhubungan	6
Tabel III. 3 Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja.....	7
Tabel III. 4 Hasil Pengukuran Kinerja 2019	7
Tabel III. 5 Analisis dan Capaian	8
Tabel III. 6 Lokasi Kemacetan Sekolah di pinggir jalan	14
Tabel III. 7 Titik Persimpangan Jalan	15
Tabel III. 8 Kemacetan Pasar Tradisional di tepi jalan	15
Tabel III. 9 Hari Besar Nasional	16
Tabel III. 10 Urusan Perhubungan pada Dinas Perhubungan	21
Tabel III. 11 Realisasi Pendapatan 2019.....	25

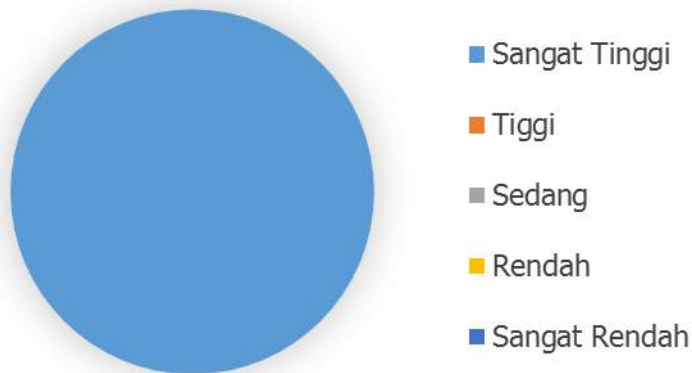
DAFTAR GAMBAR

Gambar III. 1 Grafik Hasil Pengukuran Kinerja 2019.....	8
Gambar III. 2 Grafik Analisis dan Capaian.....	9
Gambar III. 3 Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas.....	10
Gambar III. 4 Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU).....	10
Gambar III. 5 Pemeliharaan Materisasi	11
Gambar III. 6 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	11
Gambar III. 7 Pengadaan Marka Jalan.....	12
Gambar III. 8 Pengadaan Warning Light.....	12
Gambar III. 9 Pengadaan RPPJ	13
Gambar III. 10 Pengadaan PJU.....	13
Gambar III. 11 Sosialisasi Keselamatan Berjalan Lintas ke Sekolah dan Masyarakat	17
Gambar III. 12 Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas pada Sekolah.....	17
Gambar III. 13 Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)	19
Gambar III. 14 Pembinaan Sopir Kendaraan Umum.....	19
Gambar III. 15 Razia Gabungan Angkutan Umum dan Barang	19

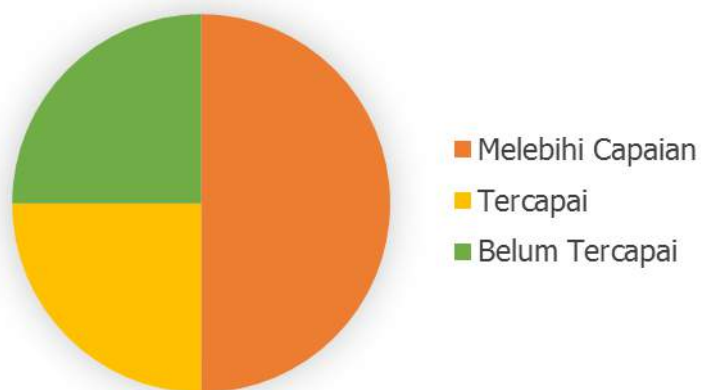
IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan Kinerja Dinas Perhubungan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

TINGKAT PENCAPAIAN IKU



KETERCAPAIAN IKU



Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa capaian IKU yang merupakan kategori **SANGAT TINGGI** sebesar 100% atau 4 indikator. Sedangkan berdasarkan ketercapaian IKU terdapat 1 indikator belum tercapai atau sebesar 25%, 1 indikator tercapai atau sebesar 25% dan 2 indikator melebihi capaian atau sebesar 50%.

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama, Dinas Perhubungan pada tahun 2019 melaksanakan 11 program, terdiri dari 40 kegiatan dengan alokasi dana Rp17.815.659.873. Dari alokasi anggaran tersebut terealisasi sejumlah Rp17.237.247.793 (96,75%) dan kinerja fisik 98,08%. Dengan demikian Dinas Perhubungan mampu memperoleh efisiensi anggaran sebesar alokasi anggaran Rp578.412.080 (3,24%).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian kinerja yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Semuanya dirangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran, juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu, laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik langkah-langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

B. Tugas dan Wewenang

1. Tugas

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di tugaskan kepada daerah. Dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan yang merupakan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

2. Fungsi

Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan tugasnya dalam wewenang melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang perhubungan serta tugas pembantuan, maka diberikan fungsi-fungsi Sebagai berikut :

- a. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- b. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang Perhubungan;

- c. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan bidang Perhubungan;
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, dan Bidang Pengujian Sarana dan Prasarana.
- f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
- g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- h. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Sumber Daya

Dinas Perhubungan terbagi menjadi 4 bagian yaitu Kesekretariatan, Bidang Lalu Lintas dan Bidang Angkutan, Bidang Prasarana, dan Bidang Pengembangan dan Keselamatan. Dinas Perhubungan sendiri mempunyai Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Harian Lepas yang berjumlah 170 Orang dengan rincian pada **Tabel I. 1** dibawah :

Tabel I. 1 Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Harian Lepas (PHL) Dinas Perhubungan 2019

No.	Jenis Ketenagaan	Keterangan					Jumlah
		Gol IV	Gol III	Gol II	Gol I	THL	
1	PNS	5	18	21	1	-	45
2	PHL					125	125
Jumlah							170

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

D. Isu - isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis dari Dinas Perhubungan Kab. Lima Puluh Kota yang merupakan faktor-faktor pelayanan OPD yaitu :

1. Urusan Perhubungan

- a. Rencana peningkatan pengelolaan terminal

Dengan semakin meningkatnya arus lalu lintas maka dirasa perlu ditingkatkan pengelolaan terminal angkutan barang menjadi 2 (dua) jalur dilokasi sekitar Terminal Rimbo data

b. Mengoptimalkan pelayanan dan infrastruktur bidang perhubungan dengan cara :

- 1) Mempertahankan dan atau meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Angkutan Sungai Danau Penyeberangan (ASDP) dan Perkeretaapian.
- 2) Peningkatan manajemen dan rekayasa lalu lintas di kawasan Ibu Kota Kabupaten (IKK) dan jalan Kabupaten.
- 3) Pengawasan terhadap pelanggaran perizinan dan standar pelayanan.
- 4) Rencana pembangunan terminal

Dengan semakin meningkatnya arus lalu lintas maka dirasa perlu dibangun terminal angkutan orang di Kawasan Ibu Kota Kabupaten (IKK) yang berlokasi di sekitar Sarilamak.

Yang diimplementasikan dalam bentuk :

- Pengelolaan terminal angkutan orang dan barang yang representatif
- Pemeliharaan alat pengujian kendaraan bermotor yang memenuhi standar teknis
- Peningkatan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Peningkatan keselamatan, ketertiban dan kelancaran angkutan
- Pengelolaan perizinan bidang angkutan yang cepat, tepat dan ramah lingkungan
- Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasaran angkutan
- Penyediaan sarana dan prasarana pengendalian dan pengamanan lalu lintas

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Tugas dan Wewenang, Sumber Daya, Isu - isu Strategis dan Sistematika penulisan

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Menjelaskan Renstra perhubungan dan Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja, Hasil Pengukuran Kinerja, Analisis dan Capaian Kinerja, Analisis Efisiensi Anggaran dan Realisasi Pendapatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota

Bab IV Penutup

Menyajikan uraian penutup berupa catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis (RENSTRA) OPD

Dinas Perhubungan adalah Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki fungsi sebagai pelaksana urusan Pemerintah Daerah di Bidang Perhubungan. Dalam pelaksanaannya adalah untuk mewujudkan tercapainya visi dan misi kepala daerah. Visi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021 adalah **“Mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis “Yang Mantap” Berlandaskan Iman dan Taqwa”**.

Dan dalam pelaksanaannya Dinas Perhubungan adalah salah satu OPD yang mewujudkan dalam pencapaian misi 6 yaitu **“Meningkatkan Infrastruktur untuk percepatan pembangunan dan daerah basis perjuangan”**.

Untuk terwujudnya Visi dan Misi Kepala Daerah tersebut maka Dinas Perhubungan sudah menyusun IKU dan Program Kegiatan di dalam dokumen perencanaan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2016 - 2021. Sebagaimana rangkumannya di tampilkan berikut ini.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Yang menjadi Indeks Kinerja Utama dari Dinas Perhubungan adalah:

1. Persentase sarana keselamatan lalu lintas jalan di jalan Kabupaten yang berfungsi baik
2. Persentase aspek penyebab kemacetan yang teratasi
3. Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan
4. Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan

B. *Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019*

Tabel III. 1 Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terpenuhinya sarana keselamatan lalu lintas jalan yang berfungsi dengan baik	Persentase sarana keselamatan lalu lintas jalan di jalan kabupaten yang berfungsi baik	50%
2	Terkendalinya kemacetan lalu lintas	Persentase aspek penyebab kemacetan yang teratasi	53%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
3	Terwujudnya angkutan umum dan barang yang laik jalan	Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan	85%
4	Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan	Nilai akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	65

Tabel III. 2 Program Urusan Perhubungan pada Dinas Perhubungan

No	Program	Anggaran (Rp)	Ket
1	2	3	4
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	7.144.468.700,00	
2	Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	272.974.050,00	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	88.160.000,00	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	72.065.000,00	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	30.402.000,00	
6	Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	237.587.000,00	
7	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	2.101.119.500,00	
8	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	799.042.000,00	
9	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	213.005.000	
10	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	6.026.533.000,00	
11	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	15.054.300,00	
	Total	17.000.410.550	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja

Dalam melakukan pengukuran capaian target kinerja ini digunakan metodologi rank capaian dengan pembagian 5 (lima) predikat. Dan untuk jelasnya maka di tampilkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel III. 3 Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja

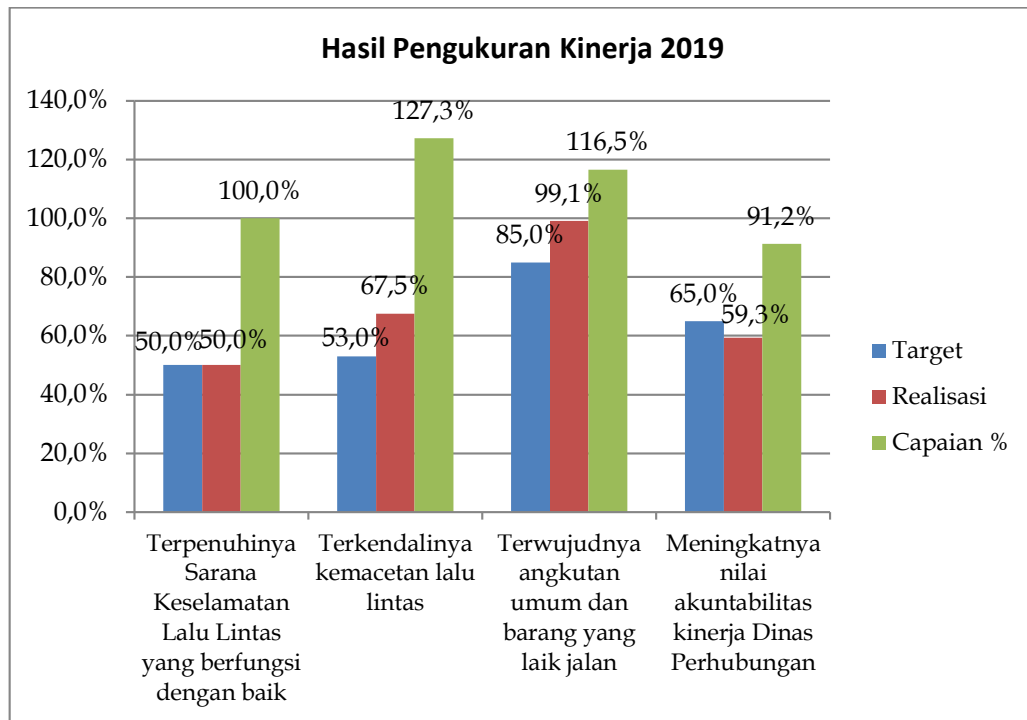
No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

B. Hasil Pengukuran Kinerja

Tabel III. 4 Hasil Pengukuran Kinerja 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Predikat
1	Terpenuhinya Sarana Keselamatan Lalu Lintas yang berfungsi dengan baik	Persentase sarana keselamatan lalu lintas jalan di jalan kabupaten yang berfungsi baik	50%	50%	100	Sangat tinggi sekali
2	Terkendalinya kemacetan lalu lintas	Persentase aspek penyebab kemacetan yang teratasi	53%	67,5%	127,35	Sangat tinggi sekali
3	Terwujudnya angkutan umum dan barang yang laik jalan	Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan	85%	99,1%	116,5	Sangat tinggi sekali
4	Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan	Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan	B (65)	CC (59.3)	91.2	Sangat tinggi

Rata-rata capaian indikator adalah 109 dari 4 sasaran strategis dan 4 indikator kinerja



Gambar III. 1 Grafik Hasil Pengukuran Kinerja 2019

C. Analisis dan Capaian Kinerja

Sasaran Strategis

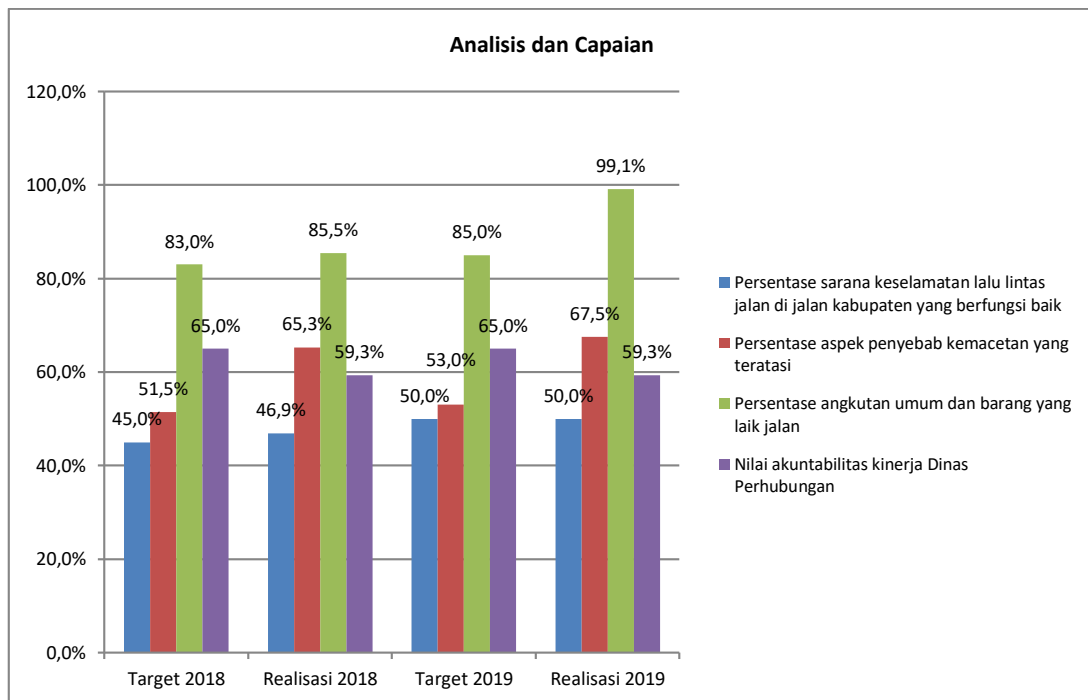
"Mewujudkan sarana keselamatan lalu lintas jalan yang berfungsi dengan baik, terkendalinya kemacetan lalu lintas, dan terwujudnya angkutan umum dan barang yang laik jalan serta meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja Dinas perhubungan."

Maka dijelaskan dalam Tabel III. 5 sebagai berikut :

Tabel III. 5 Analisis dan Capaian

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	ket
1	Persentase sarana keselamatan lalu lintas jalan di jalan kabupaten yang berfungsi baik	0	45%	46,88%	50%	50%	Target ini merupakan target indikator kinerja pada PK perubahan
2	Persentase aspek penyebab kemacetan yang teratasi	0	51,5%	65,25%	53%	67,5%	
3	Persentase angkutan umum dan barang	0	83%	85,50%	85%	99,1%	

	yang laik jalan						di mulai
4	Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan	0	B (65)	CC (59.3)	B (65)	CC (59.3)	tahun 2019



Gambar III. 2 Grafik Analisis dan Capaian

1. Persentase sarana keselamatan lalu lintas jalan di jalan kabupaten yang berfungsi baik

Untuk mewujudkan target dari terpenuhinya sarana keselamatan lalu lintas jalan yang berfungsi dengan baik dengan besaran target sebesar 50 % pada tahun 2019, maka Dinas Perhubungan telah melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan pengadaan sarana keselamatan jalan sebesar 50 %. Yang artinya target yang ditetapkan tercapai 100 %. keberhasilan ini diperoleh dengan cara melakukan :

1. Pemeliharaan

- Pemeliharaan terhadap 24 unit rambu portable dan 26 warning light yang dalam keadaan berfungsi baik dari total 50 rambu portable yang kita miliki.



Gambar III. 3 Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas

- Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan target keluaran terpeliharanya 500 titik lampu PJU yang dalam keadaan rusak atau mati, dari total 780 titik PJU yang dalam keadaan tidak berfungsi dengan baik.



Gambar III. 4 Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)

- Pemeliharaan terhadap Meterisasi PJU sejumlah 20 Titik dalam keadaan berfungsi baik



Gambar III. 5 Pemeliharaan Materisasi

2. Pengadaan

- Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas sebanyak 75 unit rambu-rambu dengan pembagian 55 unit rambu-rambu jalan dan 20 unit rambu portable.



Gambar III. 6 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas

- Pengadaan Marka Jalan dengan target keluarannya adalah 800 m² telah dilaksanakan dengan baik.



Gambar III. 7 Pengadaan Marka Jalan

- Pengadaan alat pengatur lalin Warning light sebanyak 2 unit maka jumlah warning yang dalam keadaan baik adalah 6 unit dari 14 unit warning yang di miliki.



Gambar III. 8 Pengadaan Warning Light

- Pengadaan Rambu Petunjuk Jalan (RPPJ) sebanyak 2 unit, Sehingga dengan capaian ini jumlah RPPJ yang dalam kondisi baik adalah 12 unit dari 26 unit yang kita miliki.



Gambar III. 9 Pegadaan RPPJ

- Pengadaan 306 titik PJU sehingga jumlah PJU yang berfungsi baik adalah sebesar 806 titik ditambah 404 berjumlah 1210 yang berfungsi baik dari jumlah PJU yang ada sebanyak 1969.



Gambar III. 10 Pengadaan PJU

2. Persentase aspek penyebab kemacetan yang teratasi

Untuk mewujudkan teratasinya aspek-aspek penyebab kemacetan, yang di targetkan oleh Dishub pada tahun 2019 ini untuk dapat teratasi sebesar 53 %. Maka Dinas

Perhubungan telah dapat mengatasi penyebab kemacetan sebanyak 67,5 % . Artinya persentase dari capaian target ini adalah 127,35 % . Dan dari 32,5 % yang belum terlaksana disebabkan karena kekurangan personil. Yang mana ada 4 aspek penyebab kemacetan di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu :

1. Kemacetan oleh Keramaian sekolah-sekolah di pinggir jalan (28 sekolah)

Tabel III. 6 Lokasi Kemacetan Sekolah di pinggir jalan

No	Lokasi Kemacetan	Realisasi Pelaksanaan	Realisasi
1	MTSN 3 Kec. Guguak	√	79 %
2	SMAN 1 Kec. Guguak	√	
3	SMP 1 Kec. Guguak	√	
4	SMAN 1 Kec. Suliki	√	
5	SMP 1 Suliki	√	
6	SMPN 01 Kec. Situjuah Limo N	√	
7	SMAN 01 Kec. Situjuah Limo N	√	
8	MTSN 05 Kec. Situjuah Limo N	√	
9	SD Inti Kec. Situjuah Limo N	√	
10	SDN Situjuah Padang Ambacang	X	
11	SD 01 Taeh Baruah	√	
12	SD 01 Mungka	√	
13	SMPN Mungka	X	
14	MAN Padang jopang	X	
15	SD Fullday Muhammadiyah	√	
16	SMAN 1 Kec. Harau	√	
17	SMPN 1 Kec. Harau	√	
18	SDN 01 Tanjung Pati	√	
19	SDN 02 Tanjung Pati	√	
20	SD Purwajaya	X	
21	SD 03 mungka	X	
22	SMP 1 Kec. Payakumbuh	√	
23	SMA 1 Kec. Payakumbuh	√	
24	SD 4 Sarilamak	√	

3. Titik persimpangan jalan (16 titik persimpangan)

Tabel III. 7 Titik Persimpangan Jalan

No	Lokasi Kemacetan	Realisasi Pelaksanaan	Realisasi
1	Simpang 3 SMK Guguak	√	79 %
2	Simpang 3 Danguang-Danguang	√	
3	Simpang 3 Koto Baru	X	
4	Simpang 3 Kantor wali Situjuah	X	
5	Simpang 3 Pakan Rabaa	√	
6	Simpang 3 Mungka	√	
7	Simpang 3 Padang Mungka	X	
8	Simpang 3 SMP 1 Luhak	√	
9	Simpang 3 Andaleh	√	
10	Simpang 3 Denzipur	√	
11	Simpang 4 MTS Gadut	√	
12	Simpang 4 SMA Lareh Sago Halaban	√	
13	Bundaran Kantor Bupati	√	
14	Simpang Bawah Kantor Bupati	√	
15	Simpang Kompi C	√	
16	Simpang Poli Tani	X	
17	Simpang Bhakia	√	
18	Simpang Kubang Situjuah Limo Nagari	√	
19	Depan Kantor Dinas Perhubungan	√	

4. Pasar tradisional yang berada di tepi jalan/ pasar pabukoan (15 pasar)

Tabel III. 8 Kemacetan Pasar Tradisional di tepi jalan

No	Lokasi Kemacetan	Realisasi Pelaksanaan	Realisasi
1	Pasar Danguang-danguang	X	
2	Pasar Tumpah Simp. Bakia	X	

No	Lokasi Kemacetan	Realisasi Pelaksanaan	Realisasi
3	Pasar Limbanang	X	12 %
4	Pasar Pabukoan Simp 4 Koto Baru	X	
5	Pasar Kamis Situjuah Banda Dalam	X	
6	Pasar Situjuah Batua	X	
7	Pasar Situjuah Tungkar	X	
8	Pasar Mungka	X	
9	Pasar Pabukoan Taeh Baruah	X	
10	Pasar Pabukuan Pakan Sabtu (Zipur)	X	
11	Pasar Sarilamak	√	
12	Pasar Pabukoan Simp. 4 Tj. Pati	X	
13	Pasar Pabukoan Taram	X	
14	Pasar Rabaa Gadut	X	
15	Pasar Pabukoan Simpang Poli	X	
16	Pasar Piladang	√	

5. Hari besar nasional (5 hari raya dan hari besar)

Tabel III. 9 Hari Besar Nasional

No	Lokasi Kemacetan	Realisasi Pelaksanaan	Realisasi
1	Hari Raya Idul Fitri	√	100 %
2	Hari Raya Idul Adha	√	
3	Natal dan Tahun baru	√	
4	Peristiwa Situjuah 15 Januari	√	
5	Tabur bunga Pandam Gadang	√	

Dari beberapa aspek kemacetan yang terjadi di kabupaten Lima Puluh Kota. Maka Dinas Perhubungan telah melakukan usaha - usaha sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi kepada pelajar dan masyarakat sebanyak 1000 orang dan Pelajar pelopor sebanyak 6 (Enam) orang pelajar di tingkat SLTA, dengan capaian kinerja berupa Meningkatnya Pengetahuan masyarakat dan pelajar tentang berlalu lintas.



Gambar III. 11 Sosialisasi Keselamatan Berlalu Lintas ke Sekolah dan Masyarakat

2. Melakukan pengamanan pengendalian lalu lintas di sekolah-sekolah, persimpangan jalan, pasar-pasar, hari besar dan parkir dipasar serta tepi jalan umum.



Gambar III. 12 Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas pada Sekolah

6. Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan

Untuk mewujudkan angkutan umum dan barang yang laik jalan, maka Dinas Perhubungan menargetkan capaiannya untuk tahun 2019 adalah sebesar 85 %. Dan

dalam capaian target ini dapat terealisasi sebesar 99,1 %. Dengan perhitungan perbandingan antara jumlah kendaraan yang laik jalan melalui Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor balai pengujian Dishub Kabupaten Lima puluh Kota dan jumlah kendaraan yang ada di Kabupaten Lima Puluh kota. Dengan besaran kuantitas 6.346 unit kendaraan laik jalan dari total 6.289 kendaraan wajib uji di Kabupaten lima Puluh kota. Jadi hasil realisasi target ini sebesar 116.5 %. Keberhasilan ini diperoleh dengan cara :

1. Menyediakan alat uji mekanis kendaraan bermotor dan fasilitasnya yang terdiri dari 1 unit Alat Uji Emisi Bensin (CoHC), 1 Unit Sound Level Meter, 1 Unit Headlight Tester, 1 Unit Kelengkapan (SIM PKB), Brak Testes, Kincup Roda Depan, dan Play Detector





Gambar III. 13 Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)

2. Pembinaan sopir kendaraan umum dengan meningkatnya keterampilan / pengetahuan para sopir/jurumudi AKDP dan Angkutan Perkotaan, meningkatnya ilmu, wawasan dan profesionalisme bagi para sopir angkutan umum.



Gambar III. 14 Pembinaan Sopir Kendaraan Umum

3. Melakukan 8 (delapan) kali razia Gabungan angkutan umum dan barang dengan capaian kinerja berupa Meningkatnya angkutan umum yang berizin dan laik jalan.



Gambar III. 15 Razia Gabungan Angkutan Umum dan Barang

4. Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan

Untuk mencapai target pada tahun 2019 ini dengan nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan dengan predikat B pada rang nilai 65. Maka telah dilakukan pemenuhan seluruh dokumen akuntabilitas oleh Dinas Perhubungan. Sehingga dalam Penilaian pelaporan SAKIP Dinas Perhubungan oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota telah mendapat prediket CC pada rang nilai 59,3. Sehingga dapat dijelaskan yang mana untuk capaian prediket nilai SAKIP Dishub dapat dicapai namun dalam rang nilainya terdapat selisih 5,7 poin Jadi dalam persentase capaian nilai ini telah terealisasi 91,2 %. Artinya capaian ini berpredikat sangat baik.

D. Analisis efisiensi Anggaran

Untuk Efisiensi Anggaran pada DPA Dinas Perhubungan untuk tahun 2019 dapat kami uraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel III. 10 Urusan Perhubungan pada Dinas Perhubungan

Urusan / Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kinerja		Efisiensi / Ket
			Keuangan	Fisik	
DINAS PERHUBUNGAN					
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7.262.248.023	7.125.701.356	98,12%	98,71%	136.546.667
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.294.000	8.286.000	99,90%	99,90%	8.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	6.342.115.023	6.280.659.256	99,03%	99,77%	61.455.767
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	6.809.000	68,09%	68,09%	3.191.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasioal	10.000.000	9.153.800	91,54%	46,10%	846.200
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	400.242.000	385.890.000	96,41%	96,41%	14.352.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	83.000.000	83.000.000	100,00%	99,99%	0
Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	84.578.000	59.783.800	70,68%	70,69%	24.794.200
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	2.700.000	2.685.000	99,44%	99,45%	15.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	6.000.000	6.000.000	100,00%	100,00%	0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.799.000	4.242.000	88,39%	88,39%	557.000
Penyediaan Makan dan Minum	95.000.000	64.112.500	67,49%	67,49%	30.887.500
Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	215.520.000	215.080.000	99,80%	100,00%	440.000

Urusan / Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kinerja		Efisiensi / Ket
			Keuangan	Fisik	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	360.354.050	352.116.543	97,71%	98,99%	8.237.507
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	-			
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	-			
Pengadaan Mebeleur	-	-			
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.	154.367.050	149.228.000	96,67%	99,65%	5.139.050
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	205.987.000	202.888.543	98,50%	98,50%	3.098.457
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	88.160.000	83.050.000	94,20%	99,40%	5.110.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	88.160.000	83.050.000	94,20%	99,40%	5.110.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	72.065.000	68.798.900	95,47%	100,00%	3.266.100
Pendidikan dan Pelatihan Formal	72.065.000	68.798.900	95,47%	100,00%	3.266.100
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan					
Capaian Kinerja dan Keuangan	30.402.000	30.356.000	99,85%	99,91%	46.000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.344.000	23.318.000	99,89%	99,89%	26.000
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	7.058.000	7.038.000	99,72%	100,00%	20.000
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	258.132.000	250.377.550	97,00%	100,00%	7.754.450
Penyusunan Norma, Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan	-	-			
Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	258.132.000	250.377.550	97,00%	100,00%	7.754.450

Urusan / Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kinerja		Efisiensi / Ket
			Keuangan	Fisik	
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	2.101.119.500	2.045.490.400	97,35%	99,96%	55.629.100
Pemeliharaan Rambu, APILL, Pagar Pengaman Jalan, Pita Penggaduh dan Halte	30.000.000	27.660.000	92,20%	100,00%	2.340.000
Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum (PJU)	2.071.119.500	2.017.830.400	97,43%	99,96%	53.289.100
					0
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	1.030.312.000	889.920.544	86,37%	90,99%	140.391.456
					0
Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang	561.631.500	504.404.500	89,81%	96,63%	57.227.000
Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	29.477.500	28.887.500	98,00%	98,00%	590.000
Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan	15.356.000	13.951.000	90,85%	90,85%	1.405.000
Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan	41.860.000	39.535.000	94,45%	94,45%	2.325.000
Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	40.384.000	31.172.600	77,19%	100,00%	9.211.400
Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/ awak kendaraan angkutan umum teladan	179.403.000	168.077.444	93,69%	93,70%	11.325.556
Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan	64.225.000	12.562.500	19,56%	19,56%	51.662.500
Penyuluhan Bagi para Sopir/Juru Mudi Angkutan Barang dan Khusus	28.740.000	27.715.000	96,43%	96,43%	1.025.000
Pengawasan LLAJ dan Pemanduan Perjalanan Kunjungan Kerja Bupati / Wakil	69.235.000	63.615.000	91,88%	91,88%	5.620.000

Urusan / Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kinerja		Efisiensi / Ket
			Keuangan	Fisik	
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	213.005.000	204.495.000	96,00%	99,95%	8.510.000
Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal	213.005.000	204.495.000	96,00%	99,95%	8.510.000
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	6.384.808.000	6.177.616.500	96,75%	97,74%	207.191.500
Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	74.445.000	73.561.000	98,81%	99,22%	884.000
Pengadaan Marka Jalan	302.500.000	294.004.000	97,19%	100,00%	8.496.000
Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	-	-			
Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light	171.434.000	167.610.000	97,77%	98,54%	3.824.000
Pengadaan Sarana Prasarana Lalu Lintas Jalan	-	-			
Pengadaan Rambu-rambu Pendahulu Jurusan (RPPJ)	33.295.000	31.270.000	93,92%	95,95%	2.025.000
Pengembangan Sarana dan Prasarana PJU	4.084.302.000	4.039.309.000	98,90%	99,75%	44.993.000
Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Jalan	19.692.000	7.267.500	36,91%	36,91%	12.424.500
Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Parkir	1.699.140.000	1.564.595.000	92,08%	93,11%	134.545.000
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	15.054.300	9.325.000	61,94%	61,94%	5.729.300
Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-			
Pendataan Sarana Pendukung Keselamatan Kendaraan Bermotor Dijalan	6.821.800	6.455.000	94,62%	94,63%	366.800
Sosialisasi/Penyuluhan Tentang Pengoperasian Bengkel Umum Kendaraan Bermotor	8.232.500	2.870.000	34,86%	34,86%	5.362.500
Jumlah	17.815.659.873	17.237.247.793	96,75%	98,08%	578.412.080

E. Realisasi Pendapatan

Tabel III. 11 Realisasi Pendapatan 2019

No	Jenis Pendapatan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	28.998.000	11.858.000	40,89
2	Retribusi pengujian kendaraan bermotor	640.155.000	485.018.000	75,77
3	Retribusi pemakaian kekayaan daerah	5.000.000	6.000.000	120,00
4	Retribusi terminal	447.152.000	426.885.580	95,47
5	Retribusi tempat khusus parkir	20.001.000	23.929.500	119,64
6	Retribusi Izin Trayek	-	54.000	-
Jumlah		1.141.306.000	953.745.080	83,57

.BAB IV

PENUTUP

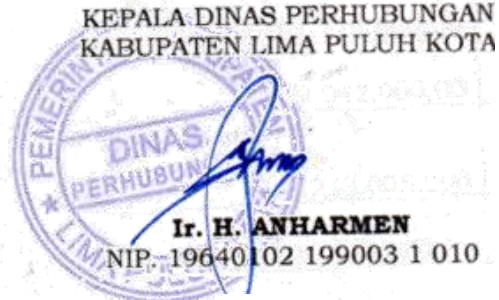
Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan suatu lembaga yang sangat vital dalam mendukung terciptanya tujuan utama pembangunan dalam rangka meningkatkan pelayanan Angkutan Barang dan Orang serta meningkatkan ketertiban lalu lintas, sarana dan prasarana Perhubungan di Kabupaten Lima Puluh Kota sehingga lalu lintas semakin lancar, tertib, cepat, aman, berkeadilan serta efisien dan efektif menuju masyarakat sejahtera.

Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota juga memiliki peran yang cukup menentukan dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat dengan melakukan peningkatan mobilitas transportasi untuk kelancaran lalu lintas barang hasil usaha masyarakat. Sehingga segala hasil usaha ekonomi masyarakat dapat terdistribusikan dengan lancar dan tepat waktu, sehingga kemungkinan kadaluarsa ataupun terlambat dari waktu yang sudah ditentukan tidak lagi terjadi.

Kiranya dapatlah untuk masa mendatang segala pihak saling membantu dan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan sehingga untuk kedepannya dapat lebih baik dalam menunaikan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan oleh daerah kepada Dinas perhubungan.

Dan terakhir harapan kami kepada seluruh masyarakat yang menjadi stakeholder Dinas Perhungan, maka kami sampaikan ucapan terima kasih atas segala kontribusi dan atensi yang telah di berikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh kota. Semoga penyusunan LKjIP ini dapat bermanfaat dan membawa kebaikan.

Tanjung Pati, Januari 2020
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



Ir. H. ANHARMEN
NIP. 19640102 199003 1 010

LAMPIRAN

1. PK 2020
2. RKT 2020
3. RENCANA AKSI 2020